

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR
DI SMK NEGERI SE-KOTA SURAKARTA**

Yosevina¹, Tri Murwaningsih², Patni Ninghardjanti³

^{1,2,3}Pendidikan Administrasi Perkantoran

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : yosevina@student.uns.ac.id, murwaningsih_tri@staff.uns.ac.id,
ning@staff.uns.ac.id

Abstract

This study aims to determine: 1) the effectiveness of the use of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) in State Vocational High Schools throughout the city of Surakarta; 2) obstacles that occur in the use of KIP; and 3) solutions given to the problems that occur. This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. Sources of research data include informants, documents, and events. The sampling technique was carried out by purposive sampling and snowball sampling. Data was collected by means of interviews, observations, and documents. The validity test technique used is triangulation of techniques and sources. Data analysis techniques with interactive analysis techniques. The results of the study are as follows: The effectiveness of KIP utilization is seen from 1) The accuracy of the target of KIP utilization, in terms of acceptance accuracy is not right because there are still poor KIP holder students who do not get assistance. Meanwhile, in terms of the accuracy of the utilization objectives, it is seen that the funds that have been disbursed by students have been used properly; 2) Socialization of the use of KIP, socialization from the education office is lacking, there is only monitoring once a year. However, socialization to students has been carried out well by the school; and 3) Monitoring of KIP utilization has been carried out by the school through a whatsapp group, from the results of this monitoring the use of KIP in State Vocational Schools throughout the city of Surakarta can be categorized as effective.

Keywords: Effectiveness, Kartu Indonesia Pintar, Utilization, Qualitative, Case Study

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menjadi tolak ukur berkembangnya suatu negara. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan dan pembangunan di bidang pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom, dalam pasal 3 tentang bidang pendidikan dan kebudayaan, bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan peserta didik atau mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali.

Pendidikan merupakan solusi untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, seseorang dapat hidup dengan layak sesuai yang diharapkan. Menurut (Fathurrohman & Sulistyorini, 2012), bahwa pengertian pendidikan yaitu suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi perbaikan nasib sumber daya manusia dalam menjalani kehidupannya. Pelaksanaan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan perubahan pola hidup kepada peserta didik.

Salah satu yang mendukung pelaksanaan pendidikan adalah kebijakan pemberian bantuan biaya penunjang pendidikan atau

beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu. Menurut (Saini et al., 2021), bahwa kebijakan pendidikan nasional ini membantu dalam mengatasi masalah buta huruf, menghilangkan kesenjangan, dan menyediakan lingkungan pendidikan yang setara. Menurut pendapat (Ellis, 2015), bahwa kebijakan dan intervensi pendidikan federal seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan *Race to the Top* diberlakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan dengan memberikan dukungan akademis dan sosial yang melengkapi apa yang tidak dapat diakses oleh anak-anak dan keluarga dalam jalur pendidikan. Sejalan dengan pendapat (Cosentino et al., 2019), bahwa dengan adanya program Beasiswa di negara berkembang dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan kritis, meningkatkan akses dan pencapaian untuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Namun nyatanya, tujuan dari program beasiswa tersebut tidak pernah didefinisikan secara eksplisit.

Berdasarkan Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah tahun 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyatakan isu strategis yaitu perluasan pendidikan menengah universal yang berkualitas. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas dengan strategi pemihakan kepada peserta didik yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke

jenjang pendidikan menengah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, mengamanatkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana tersebut kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang PIP yang menyatakan bahwa PIP melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. PIP ini bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan diterapkannya KIP adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6 – 21 tahun sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal atau Rintisan Wajib Belajar 12 tahun/bahkan sampai jenjang pendidikan tinggi. Tujuan utama dari program ini sebagai upaya pencegahan peserta didik yang putus sekolah akibat masalah ekonomi, dan menarik kembali peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali menempuh pendidikan di lembaga formal maupun non formal. Sesuai

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP. PIP memiliki beberapa prinsip yaitu sebagai berikut efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.

Bantuan PIP disalurkan dua kali dalam satu tahun melalui KIP. Pengambilan manfaat KIP dilakukan secara langsung ke bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Dana bantuan PIP diberikan langsung kepada peserta didik untuk 1) membeli buku dan alat tulis; 2) membeli perlengkapan sekolah; 3) transportasi peserta didik ke sekolah; 4) uang saku peserta didik; 5) biaya kursus/les tambahan bagi pendidikan formal dan 6) biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja. Setelah menerima dana bantuan PIP peserta didik mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana seperti rajin dan tekun dalam belajar, disiplin mengerjakan tugas, dan berkepribadian baik, serta tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Besaran bantuan KIP diberikan pemerintah di setiap jenjang pendidikan berbeda-beda. Dengan besaran uang tunai yang diberikan, pemerintah berharap dana bantuan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima KIP. Namun

kenyataannya, terdapat permasalahan yaitu adanya perbedaan jumlah peserta didik yang telah mencairkan dana dengan jumlah peserta didik yang seharusnya mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah. Sejalan dengan hasil penelitian (Astuti, 2017; Rohaeni & Saryono, 2018; Yusup et al., 2019), permasalahan tersebut terjadi karena : 1) adanya mekanisme penerimaan bantuan yang berubah-ubah; 2) masih terdapat peserta didik yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana PIP sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu banyak yang belum terdaftar sebagai penerima dana PIP; 3) adanya kesenjangan antara pelaksanaan PIP dengan petunjuk teknis pelaksanaan PIP dari pemerintah; 4) pemanfaatan dana bantuan yang kurang tepat; dan 5) adanya intervensi elit politik lokal, hingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti penggunaan dana KIP.

Berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 1, SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 6 Surakarta, bahwa masih terdapat permasalahan seperti : 1) Banyak peserta didik yang memiliki atau memegang KIP tidak mendapatkan bantuan dana PIP, karena yang menentukan dari dinas pendidikan melalui sistem *by name*, sehingga pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti kenapa banyak peserta didik yang tidak mendapat bantuan; dan 2) Adanya kesulitan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemanfaatan dana PIP oleh

peserta didik, dikarenakan mekanisme penyaluran dana PIP secara langsung ditransfer ke rekening peserta didik melalui kartu ATM/buku rekening tanpa perantara pihak sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) efektivitas pemanfaatan KIP bagi peserta didik di SMK Negeri se-Kota Surakarta; 2) kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP bagi peserta didik di SMK Negeri se-Kota Surakarta; dan 3) solusi yang diberikan atas kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP bagi peserta didik di SMK Negeri se-Kota Surakarta.

Pengertian efektif menurut (Badrudin, 2013), yaitu suatu kemampuan dalam mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Sejalan dengan pendapat (Mahsun, 2014), bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dalam suatu proses kegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut (Pulungan, 2019), bahwa mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji berbagai sudut pandang. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut (Badrudin, 2013), untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan menggunakan beberapa indikator antara lain ketepatan sasaran

program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Karmila et al., 2019; Ngide & Erwinsyah, 2020; Rozikin, 2020), bahwa efektivitas pemanfaatan dana PIP melalui pemberian KIP bagi peserta didik sudah efektif. Dilihat dari : 1) pemanfaatan dana yang diperoleh peserta didik dari PIP melalui KIP sudah sesuai dengan juknis dari pemerintah, yaitu sudah dimanfaatkan untuk keperluan perlengkapan sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang saku, biaya kursus/les, dan lain sebagainya; 2) pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam juknis yang ada; 3) penerima bantuan PIP sudah tepat sasaran, yaitu peserta didik dari keluarga miskin atau kurang mampu; dan 4) peningkatan prestasi belajar siswa, sesudah mendapatkan bantuan PIP lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1, SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 6 Surakarta. Waktu penelitian dimulai dari Agustus-Oktober 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dicari secara langsung di lapangan yaitu melalui

wawancara dengan guru Bimbingan Konseling (BK/BP) atau petugas KIP dan wawancara dengan peserta didik penerima bantuan di setiap sekolah, serta data tertulis dari pihak sekolah. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari berbagai pustaka atau sumber lain seperti buku, dokumen, jurnal, arsip, dan data dari website/internet mengenai kebijakan bantuan PIP melalui pemberian KIP yang mendukung. Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan (Guru BK/Petugas KIP dan Peserta Didik Penerima Bantuan), Dokumen, serta Tempat dan Peristiwa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Karena, dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu informan yang benar-benar memahami (*key informan*) mengenai program bantuan PIP melalui KIP seperti tim pelaksana KIP dan peserta didik penerima PIP. Sedangkan, teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang semula jumlahnya kecil, kemudian lama-lama menjadi besar. Karena dalam penelitian ini, yang semula hanya melakukan wawancara dengan 1 – 2 petugas KIP saja, namun dalam pengambilan data menjadi luas yaitu wawancara dengan beberapa petugas KIP dan peserta didik penerima bantuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan, teknik uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan, triangulasi sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif yaitu dimana data yang diperoleh disajikan apa adanya untuk memperoleh fakta yang ada di lapangan. Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Prosedur penelitian merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 1) tahap identifikasi masalah; 2) tahap penetapan fokus penelitian; 3) tahap pengumpulan data; 4) tahap analisis data; dan 5) tahap pelaporan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan mengenai hasil penelitian mengenai efektivitas pemanfaatan dana PIP melalui KIP di SMK

Negeri se-Kota Surakarta untuk menjawab rumusan masalah. Pertama, deskripsi efektivitas pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta dilihat dari 1) Ketepatan Sasaran Program; 2) Sosialisasi Program; dan 3) Pemantauan Program. Kedua, kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP. Dan ketiga, solusi atas kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP.

Ketepatan sasaran program dilihat dari ketepatan penerimaan dan ketepatan tujuan pemanfaatan. Ketepatan penerimaan dalam pelaksanaan disekolah sendiri belum tepat dengan sasaran yang diharapkan. Karena, masih ada penerima KIP yang belum mendapatkan bantuan PIP sehingga banyak peserta didik kurang mampu/miskin yang mempunyai KIP namun belum mendapatkan bantuan PIP. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber (informan I-IV) yang menyatakan bahwa, belum maksimalnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dengan sekolah dalam pendataan penerima bantuan PIP melalui KIP sehingga masih banyak peserta didik kurang mampu tidak mendapatkan bantuan, sedangkan peserta didik yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Mekanisme pengusulan bantuan di setiap sekolah juga berbeda-beda yaitu dengan pengumpulan

berkas-berkas peserta didik pada saat awal kelas X atau dengan mengambil data peserta didik (data SMP) dari Dapodik. Keputusan diterima atau tidaknya peserta didik ditentukan oleh pihak dinas pendidikan, pihak sekolah tidak mengetahui seperti apa kriteria khusus penerima bantuan, pihak sekolah hanya sebagai pengusul di Dapodik.

Sedangkan, ketepatan tujuan pemanfaatan dilihat dari proses pencairan dana dan pemanfaatan dana sudah tepat. Proses pencairan dana dapat dilakukan dengan mudah oleh peserta didik penerima bantuan PIP melalui bank penyalur yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Proses pencairan dana sendiri dapat dilakukan setelah mendapatkan SK Penerima dari dinas pendidikan, lalu pihak sekolah mengumumkan ke peserta didik penerima bantuan untuk mencairkan ke bank BNI (melalui ATM atau buku tabungan beserta persyaratan lainnya). Serta, hasil dari wawancara dengan peserta didik penerima bantuan KIP yang menyatakan bahwa mereka rutin melaporkan telah mencairkan dana dengan melampirkan bukti pencairan. Dana bantuan yang telah dicairkan oleh peserta didik juga sudah dimanfaatkan dengan baik yaitu untuk keperluan sekolah dengan baik seperti membeli peralatan dan perlengkapan

sekolah, membeli paket data/kuota, membayar biaya sekolah selain biaya SPP, dan sisanya ditabung.

Sosialisasi

pemanfaatan, proses sosialisasi keberadaan PIP dilakukan mulai dari tingkat pusat, ke daerah, sampai kepada pengelola PIP yang berada di tingkat satuan pendidikan. Lalu, dari tingkat satuan pendidikan memberikan informasi kepada peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, proses sosialisasi belum dilakukan secara intensif oleh pihak dinas pendidikan ke sekolah hanya ada monitoring melalui BPK setiap satu tahun sekali. Sedangkan, untuk sosialisasi kepada peserta didik pihak sekolah sudah dilakukan dengan baik yaitu pada saat awal kelas X dan setelah SK penerimaan bantuan KIP diumumkan oleh pihak dinas pendidikan. Namun, dalam pandemi seperti ini sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah melalui *whatsapp group*.

Pemantauan

pemanfaatan dana dilakukan oleh pihak sekolah dengan baik. Waktu pandemi seperti ini, pihak sekolah memantau peserta didik melalui *whatsapp group*. Pemantauan yang dilakukan seperti bertanya kepada peserta didik apakah sudah mencairkan dana, melaporkan bukti pencairan dana ke sekolah, bertanya terkait alokasi

penggunaan dananya, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, peserta didik yang telah mendapatkan bantuan PIP rata-rata mengalami kenaikan dalam hal motivasi belajarnya, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Dengan naiknya motivasi belajar peserta didik rata-rata hasil belajarnya juga naik. Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana PIP oleh peserta didik dinyatakan sudah efektif dilihat dari hasil wawancara kepada 13 informan, yang menyatakan efektif ada sebanyak 8 informan.

Kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta, antara lain : 1) kurangnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah; 2) kuota peserta didik pemegang KIP yang mendapatkan bantuan PIP tidak terpenuhi; dan 3) penyaluran dana PIP tidak tepat waktu. Koordinasi dalam pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP di ketiga SMK Negeri se-kota Surakarta masih sangat terbatas antara dinas pendidikan kota dengan pihak sekolah. Sehingga, informasi yang diterima sekolah tidak

lengkap dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua peserta didik mengenai program bantuan PIP melalui pemberian KIP.

Kuota peserta didik pemegang KIP yang mendapatkan bantuan PIP tidak terpenuhi. Dari hasil penelitian, dalam pelaksanaan bantuan dana PIP melalui pemberian KIP di sekolah sendiri belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Karena, masih ada peserta didik pemegang KIP namun tidak mendapatkan bantuan PIP sehingga banyak peserta didik kurang mampu dikategorikan miskin belum mendapatkan bantuan dana PIP. Hal itu disebabkan oleh, kurangnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah dalam pendataan penerima KIP.

Penyaluran dana PIP tidak tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terdapat suatu kendala yaitu SMK Negeri 3 Surakarta belum menerima bantuan dana PIP pada tahun 2021. Jumlah dana yang diterima sendiri yaitu Rp 500.000,00 per semester atau Rp 1.000.000,00 per tahun. Penerima KIP mengaku sudah menerima dana bantuan PIP ada yang sebanyak 2 kali dan ada juga yang 1 kali sampai pada akhir tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 belum ada informasi dari dinas

pendidikan mengenai turunnya bantuan dana PIP di SMK Negeri 3 Surakarta. Perbedaan jumlah banyaknya pencairan dikarenakan adanya beberapa tahap dalam pencairan dana dari dinas pendidikan, sehingga ada beberapa sekolah dalam satu tahun hanya satu sampai dua tahap saja bahkan tidak turun. Sehingga, peserta didik tidak bisa memanfaatkan dana bantuan PIP untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik.

Solusi atas kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP yaitu antara lain : 1) koordinasi rutin dari pihak dinas pendidikan; 2) pendataan ulang peserta didik calon penerima bantuan PIP; dan 3) memperbaiki regulasi waktu penyaluran dana. Untuk mengatasi kendala yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah, sebaiknya dari dinas menyelenggarakan koordinasi rutin seperti sosialisasi 2 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan bantuan KIP mulai dari pengusulan hingga pelaporan pencairan dana. Sehingga, pihak sekolah dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan PIP karena tugas pihak sekolah hanya dapat mengusulkan dan menginformasikan apa saja yang telah diberikan pihak dinas pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya

koordinasi rutin dari pihak dinas pendidikan melalui pemberian sosialisasi, pihak sekolah kedepannya mampu menjelaskan secara jelas dan tepat kepada peserta didik penerima maupun orang tua bahwa pihak sekolah hanya mengusulkan, semua keputusan diterima atau tidaknya dari dinas pendidikan melalui sistem (*by name*) dengan beberapa kriteria tertentu.

Solusi atas kendala yang kedua yaitu sebaiknya ada pendataan ulang peserta didik calon penerima bantuan PIP yang dilakukan pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah. Pendataan ulang seperti melakukan survei terlebih dahulu mengenai data peserta didik yang mengusulkan, sehingga dapat diketahui dengan pasti peserta didik yang benar-benar tidak mampu dan yang mampu. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam pendataan awal maupun pendataan ulang mengenai penerima bantuan dana PIP melalui pemberian KIP ini.

Solusi untuk kendala yang ketiga yaitu memperbaiki regulasi waktu penyaluran dana. Penyaluran dana PIP di setiap sekolah berbeda-beda ada yang setahun dua tahap, ada yang satu tahap, bahkan ada yang belum turun. Perbedaan jumlah banyaknya pencairan

dikarenakan adanya beberapa tahap dalam penyaluran dana dari dinas. Mengenai permasalahan ini, pihak sekolah sudah melaporkan ke pihak dinas pendidikan namun belum ada tindakan. Seharusnya pihak dinas pendidikan menetapkan bulan atau tanggal tertentu untuk menyalurkan dana agar SK dapat serentak diterima oleh pihak sekolah, sebaiknya untuk bulan atau tanggalnya di awal semester agar dana bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses pelaksanaan pemanfaatan program KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta dapat dikategorikan sudah efektif sesuai dengan petunjuk teknis yang merupakan standar dasar dan acuan dalam pelaksanaan PIP. Pada sub bab ini akan memaparkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana efektivitas pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta?; 2) Apa saja kendala yang terjadi dalam pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta?; dan 3) Bagaimana solusi yang diberikan atas kendala yang

terjadi dalam pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta?.

Efektivitas pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta dilihat dari : 1) ketepatan sasaran program; 2) sosialisasi program; dan 3) pemantauan program. Ketepatan sasaran program yaitu pengukuran sejauh mana program tersebut tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan sejak awal. Ketepatan sasaran dilihat dari ketepatan penerimaan dan ketepatan tujuan pemanfaatan.

Ketepatan penerimaan, ketepatan sasaran program KIP adalah program PIP melalui pemberian KIP ditujukan untuk peserta didik pemegang KIP dan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan PIP melalui KIP belum tepat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerja sama antara dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam pendataan penerima bantuan PIP melalui pemberian KIP sehingga masih banyak peserta didik yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan, sedangkan peserta didik yang mampu mendapatkan bantuan. Karena keputusan diterima atau tidaknya peserta didik ditentukan oleh pihak

dinas pendidikan, pihak sekolah tidak mengetahui seperti apa kriteria khusus penerima bantuan, pihak sekolah hanya sebagai pengusul di website Dapodik. Dari segi penetapan SK penerima, pihak sekolah tidak memahami kriteria yang diambil sehingga nama-nama yang keluar sebagai penerima dana PIP banyak bukan dari nama peserta didik yang diajukan, ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki KIP mendapatkan dana PIP bahkan ada peserta didik yang mendapatkan dana dari keluarga mampu maupun peserta didik yang sudah lulus. Hal ini, menimbulkan kebingungan terutama dari pihak sekolah. Informasi penetapan penerima bantuan dari dinas pendidikan juga tidak ada, sekolah harus aktif sendiri mengecek di website Dapodik.

Ketepatan tujuan pemanfaatan. Dana PIP dapat di manfaatkan oleh penerima manfaat untuk keperluan sekolah sesuai yang disebutkan dalam Persekjen Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut : membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya); membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan

formal; dan/atau biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses pencairan dana dapat dilakukan dengan mudah oleh peserta didik penerima bantuan PIP melalui bank BNI, baik menggunakan ATM/buku tabungan. Proses pencairan dananya sendiri dapat dilakukan setelah mendapatkan SK Penerima dari dinas, lalu pihak sekolah mengumumkan ke peserta didik penerima bantuan untuk mencairkan ke bank BNI. Serta, dilihat dari hasil wawancara bahwa seluruh peserta didik penerima bantuan KIP rutin dalam melaporkan bahwa mereka telah mencairkan dana dan melampirkan bukti pencairan. Dana bantuan yang telah dicairkan oleh peserta didik juga sudah dimanfaatkan dengan baik yaitu untuk keperluan sekolah dengan baik seperti membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, membeli paket data/kuota, membayar biaya sekolah selain biaya SPP, dan sisanya ditabung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2018), bahwa keefektifan pemanfaatan dana bantuan PIP yaitu ketika dana PIP telah digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti

buku sekolah, alat tulis, seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, iuran bulanan, dan les/bimbingan belajar. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa keefektifan penggunaan dana PIP dapat terlaksana karena peserta didik penerima PIP sudah memahami pemanfaatan dana PIP sesuai dengan peraturan. Sesuai dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riddell & Niño-Zarazúa, 2016), mengenai keefektifan pemberian bantuan dana pendidikan pada peserta didik adalah ketika dana yang diberikan kepada peserta didik dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam belajar dan menunjukkan hasil prestasi yang baik. Penggunaan dana PIP tiap penerima manfaat berbeda-beda, hal itu dikarenakan berbagai faktor antara lain : 1) keadaan latar belakang ekonomi peserta didik, 2) kurangnya sosialisasi penggunaan dana kepada peserta didik penerima manfaat; dan 3) kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana PIP.

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses sosialisasi keberadaan PIP melalui pemberian KIP telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah kepada peserta didik. Namun, tidak berlaku antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah melainkan hanya ada monitoring setiap satu tahun sekali melalui BPK di SMK Negeri yang ditunjuk. Menurut (Ahmad, 2013:526), bahwa “Proses sosialisasi telah dilakukan secara intensif kepada *stakeholder* dengan bentuk penyebaran surat dari direktorat teknis, rapat koordinasi, dan penyebaran petunjuk teknis baik melalui pertemuan-pertemuan, dan media sosialisasi. Sosialisasi pula dilakukan pada pihak terkait dengan kerja sama yang intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.” Sosialisasi program KIP di sekolah sudah berjalan dengan baik, sehingga peserta didik dapat lebih bersemangat dalam mengembangkan potensi diri mereka sehingga dapat berprestasi di sekolah. Pelaksanaan sosialisasinya sendiri yaitu mengumpulkan peserta didik penerima bantuan PIP di suatu ruang untuk menginformasikan pelaksanaan bantuan PIP melalui KIP mulai dari

pengusulan hingga pencairan dana dan pemanfaatannya, namun untuk pandemi seperti sekarang ini sosialisasi dilakukan pihak sekolah melalui *whatsapp group*.

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP, perlu adanya perhatian khusus terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP, agar pemberian KIP tepat sasaran dan dana bantuan pendidikan dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Pihak sekolah dalam melakukan pemantau program bantuan dana PIP ini sudah baik, dilihat dari tertibnya peserta didik dalam melaporkan bahwa ia telah mencairkan dana bantuan tersebut dengan melampirkan bukti pencairan dananya. Peserta didik penerima bantuan PIP juga mengatakan bahwa pihak sekolah sudah memberikan arahan mengenai pemanfaatan dana dengan baik. Dari pemantauan, pihak sekolah dapat mengevaluasi siapa sajakah yang sudah mencairkan, yang belum mencairkan, dan alokasi penggunaan dana oleh peserta didik seperti apa. Serta dilihat dari hasil wawancara, bahwa peserta didik yang telah mendapatkan bantuan PIP

rata-rata mengalami kenaikan dalam hal motivasi belajarnya, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Dengan naiknya motivasi belajar peserta didik rata-rata hasil belajarnya juga naik. Sejalan hasil penelitian (Hayati & Sari, 2019), bahwa dari aspek kegiatan belajar peserta didik penerima PIP menunjukkan ada peningkatan hasil belajar dan ada juga yang tidak menunjukkan perubahan. Kegiatan monitoring juga dilakukan dari pihak dinas pendidikan sendiri yaitu satu kali dalam setahun melalui BPK guna untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan dana PIP melalui pemberian KIP di setiap sekolah khususnya SMK Negeri se-Kota Surakarta. Sesuai dengan hasil penelitian (Ahmad, 2013), yang menyatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intensif telah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dalam bentuk koordinasi dan pemantauan langsung oleh tim monitoring.

Kendala dalam sebuah program pasti ditemukan. Bantuan dana PIP melalui KIP mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. PIP dapat berkontribusi terhadap perkembangan peserta didik dalam bidang pendidikan. Namun, tidak

dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan KIP masih menghadapi sejumlah kendala. Pelaksanaan pemanfaatan KIP tidak selalu berjalan lancar, dalam pelaksanaannya masih menemui kendala sebagai berikut : 1) kurangnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah; 2) kuota peserta didik pemegang KIP yang mendapatkan bantuan PIP tidak terpenuhi; dan 3) penyaluran dana PIP tidak tepat waktu.

Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan PIP dari pihak dinas pendidikan membuat guru dan staff sekolah terkadang tidak memahami mengenai cara pengajuan, penetapan, penerima, pencairan dana, sehingga pihak sekolah kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat dan orang tua peserta didik mengenai PIP. Sesuai dengan penelitian (Agusman, 2019), bahwa dalam pelaksanaan PIP pihak dinas pendidikan melakukan sosialisasi hanya 1 kali dalam satu tahun seharusnya dilakukan 2 – 3 kali sosialisasi, serta tidak ada pemberian buku pedoman PIP di sekolah sehingga mengharuskan para guru SD Negeri 1 Kolakaasi untuk mencari informasi sendiri mengenai PIP. Sejalan dengan penelitian (Ahmad, 2013), bahwa sosialisasi masih sangat terbatas dari

pihak dinas pendidikan kota sehingga informasi yang diterima sekolah tidak lengkap, karena hanya berlangsung satu kali dalam setahun. Oleh karena itu, kurangnya koordinasi antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah, mengakibatkan para guru atau staff sekolah kurang memahami mengenai informasi pelaksanaan bantuan dana PIP sehingga para guru dan staff sekolah belum dapat menjawab permasalahan yang diajukan oleh orang tua peserta didik dengan tepat.

Kuota peserta didik pemegang KIP yang mendapatkan bantuan PIP tidak terpenuhi. Proses pendataan calon penerima bantuan dana PIP melalui pemberian KIP dilakukan oleh pihak sekolah satu tahun sekali dan ditujukan kepada dinas pendidikan melalui Dapodik. Namun, yang mengambil keputusan berhak diterima atau tidaknya dari dinas pendidikan melalui sistem *by name*. Sehingga, banyak peserta didik pemegang KIP dikategorikan mampu mendapatkan bantuan PIP sedangkan peserta didik pemegang KIP dikategorikan tidak mampu tidak mendapatkan bantuan PIP. Sejalan dengan penelitian (Ahmad, 2013) bahwa, terdapat beberapa data peserta didik yang tidak valid dan tidak ada waktu untuk

perbaikan berkas (berkas susulan) sehingga peserta didik yang berhak mendapatkan KIP tidak menerima bantuan tersebut. Menurut (Hayati & Sari, 2019), bahwa sasaran PIP di SMAN 1 Sembawa tidak tepat karena masih banyak peserta didik yang memiliki KIP tidak mendapatkan bantuan, peserta didik yang menerima bantuan bukan berasal dari keluarga kurang mampu, serta peserta didik yang menerima bantuan tidak sesuai dengan prioritas kriteria sesuai Permendikbud.

Waktu penyaluran dana bantuan PIP yang tidak tepat waktu membuat kebutuhan peserta didik untuk pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik, karena waktu penetapan penerima SK tidak bisa diprediksi, terkadang dalam satu tahun sekolah bisa mendapatkan dua kali dalam waktu yang berdekatan bahkan tidak sama sekali turun atau terbit. Sejalan dengan penelitian (Yusup et al., 2019), bahwa faktor penghambat pelaksanaan PIP antara lain penyaluran dana sering terlambat sehingga dana bantuan tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta didik secara berkesinambungan; tim pelaksana kesulitan memonitoring penggunaan dana karena langsung diterima oleh peserta didik; serta banyak penerima PIP

yang sudah lulus sedangkan dananya harus dikembalikan ke pemerintah, sehingga dana tidak bisa digunakan untuk membantu peserta didik yang lebih membutuhkan. Menurut (Ahmad, 2013:540) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa “Penyaluran dana PIP di setiap tahun mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan antara lain : 1) karena adanya perubahan regulasi anggaran, dan 2) perubahan struktur kepemimpinan baik ditingkat satuan pendidikan sampai pada level pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat yang mengeksekusi bantuan PIP.” Keterlambatan penyaluran dana PIP dapat berdampak pada rendahnya serapan atau manfaat anggaran oleh peserta didik karena waktu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.

Solusi atas kendala yang terjadi antara lain : 1) koordinasi rutin dari pihak dinas pendidikan; 2) pendataan ulang peserta didik calon penerima bantuan PIP; dan 3) memperbaiki regulasi waktu penyaluran dana. Koordinasi dari pihak dinas pendidikan seperti adanya sosialisasi terkait program PIP melalui pemberian KIP perlu dilakukan dengan rutin dan tepat dengan mengintensifkan peran aktif stakeholder, baik stakeholder di daerah, pemerintah dan

masyarakat umum sehingga memiliki konsep dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan bantuan dana PIP melalui pemberian KIP di sekolah. Metode sosialisasi yang dapat dilakukan agar setiap informasi mengenai PIP langsung diterima oleh masyarakat luas yaitu dengan membentuk jaringan komunikasi yang dikoordinir oleh satuan kerja terkait, materi sosialisasi mengenai PIP dapat disebarluaskan melalui website, whatsapp, serta media sosial lainnya. Sosialisasi rutin perlu dilakukan secara terbuka kepada peserta didik dan orang tua peserta didik agar mereka dapat mengetahui dan memenuhi syarat administrasi pengajuan bantuan dana PIP, sehingga tidak ada lagi peserta didik miskin dan peserta didik pemegang KIP yang tidak mendapatkan bantuan PIP.

Pendataan ulang peserta didik calon penerima bantuan PIP. Pendataan awal data peserta didik perlu adanya kerja sama antara pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah. Dalam pendataan awal seharusnya dilakukan verifikasi data terhadap calon penerima dana PIP. Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan untuk dapat menjaring peserta PIP sesuai dengan ketentuan program yang dijelaskan dalam petunjuk teknis PIP. data

yang sudah diserahkan oleh peserta didik harus diteliti dengan cermat agar mematuhi standar persyaratan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya peserta didik dari keluarga tidak mampu yang memiliki KIP namun tidak ditetapkan sebagai PIP yaitu dengan melakukan pendataan ulang dari awal dengan cara verifikasi data. Sehingga, meminimalisir adanya ketimpangan penerimaan bantuan PIP. Sejalan dengan penelitian (Setyawan, 2018) bahwa, kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan memeriksa satu persatu kelengkapan persyaratan, kemudian sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima PIP yang memenuhi persyaratan, disahkan dengan surat pernyataan sekolah penerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Sehingga, melalui upaya pendataan ulang dengan verifikasi data diharapkan program bantuan PIP melalui pemberian KIP ini dapat memberikan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan dalam artian peserta didik dari keluarga yang benar-benar tidak atau kurang mampu.

Berkaitan dengan proses penyaluran dana bantuan PIP melalui pemberian KIP dirasakan tidak tepat waktu. Diharapkan dari pihak dinas pendidikan

melakukan perbaikan regulasi atas aturan waktu dalam penyaluran dana. Sebaiknya waktu ideal dalam penyaluran dana bantuan disetiap sekolah khususnya SMK Negeri se-Kota Surakarta yaitu pada saat awal semester, sehingga dana bantuan yang diterima peserta didik agar dapat digunakan untuk keperluan dalam pendidikan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri se-Kota Surakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta, dilihat dari:

a. Ketepatan Sasaran Pemanfaatan KIP

Ketepatan sasaran dilihat dari ketepatan penerimaan belum efektif, karena tidak ada koordinasi antara pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam pendataan penerima bantuan PIP sehingga terdapat peserta didik yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan, sedangkan peserta didik yang mampu mendapatkan bantuan. Sedangkan dilihat dari ketepatan tujuan pemanfaatan sudah

efektif, terlihat dari proses pencairan dana dapat dilakukan dengan mudah oleh peserta didik. Serta, dana bantuan yang telah dicairkan oleh peserta didik juga sudah dimanfaatkan dengan sangat baik yaitu untuk keperluan sekolah dengan baik seperti membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, membeli paket data/kuota, membayar biaya sekolah selain biaya SPP, dan sisanya ditabung.

b. Sosialisasi Pemanfaatan KIP

Sosialisasi

keberadaan PIP melalui pemberian KIP telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah kepada peserta didik. Namun, tidak berlaku antara pihak dinas pendidikan dengan pihak sekolah, karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah melainkan hanya ada monitoring setiap satu tahun sekali melalui BPK di SMK Negeri yang ditunjuk.

c. Pemantauan Pemanfaatan KIP

Pihak sekolah dalam melakukan pemantauan program bantuan dana PIP ini

sudah baik, dilihat dari tertibnya peserta didik dalam melaporkan bahwa ia telah mencairkan dana bantuan tersebut dengan melampirkan bukti pencairan dananya. Peserta didik yang telah mendapatkan bantuan PIP rata-rata mengalami kenaikan dalam hal motivasi belajarnya, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas dan bersemangat dalam proses pembelajaran serta rata-rata hasil belajarnya juga naik.

Oleh karena itu, berdasarkan ketiga indikator efektivitas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemanfaatan program KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta dapat dikategorikan baik atau sudah efektif sesuai dengan petunjuk teknis yang merupakan standar dasar dan acuan dalam pelaksanaan PIP.

2. Kendala yang terjadi dalam Pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta

Kendala yang terjadi yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya Koordinasi antara Pihak Dinas Pendidikan dengan Pihak Sekolah
- b. Kuota Peserta Didik Pemegang KIP yang Mendapatkan Bantuan PIP Tidak Terpenuhi

- c. Penyaluran Dana PIP Tidak Tepat Waktu
3. Solusi atas kendala yang terjadi dalam Pemanfaatan KIP di SMK Negeri se-kota Surakarta
- Solusi atas kendala yang terjadi yaitu sebagai berikut :
- a. Koordinasi Rutin dari Pihak Dinas Pendidikan
 - b. Pendataan Ulang Peserta Didik Calon Penerima Bantuan PIP
 - c. Memperbaiki Regulasi Waktu Penyaluran Dana

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan guna perbaikan pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana PIP melalui pemberian KIP pada tahun berikutnya, antara lain :

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi

Bagi pihak dinas perlu adanya koordinasi paling sedikit dua kali dalam satu tahun dengan pihak sekolah dan peserta didik/orang tua peserta didik penerima KIP agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan PIP. Dan, perlunya pendataan ulang dan penetapan prioritas utama penerima PIP agar tidak ada lagi ketidaktepatan sasaran karena pada dasarnya masih banyak peserta didik pemegang KIP yang perlu mendapatkan bantuan.

Pendataan ulang lebih baik melibatkan pihak sekolah karena pihak sekolah lebih tahu mana peserta didik yang mampu dan kurang mampu. Sehingga, lebih terorganisir antara pihak dinas dan pihak sekolah dalam mendapatkan data yang benar-benar valid agar program tersebut tepat sasaran. Serta, pihak dinas perlu melakukan perbaikan mengenai sistem dalam proses penyeleksian penerima bantuan, seharusnya pihak dinas menetapkan jumlah kuota penerima disetiap tahunnya.

2. Bagi Tim Petugas KIP di Sekolah

Untuk meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan dana oleh peserta didik, diharapkan petugas KIP perlu adanya pemantauan yang lebih ketat setiap dana turun sehingga tidak ada penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan oleh peserta didik penerima bantuan. Serta, untuk mengurangi ketimpangan penerima bantuan PIP, seharusnya petugas KIP melakukan verifikasi awal (survei) terkait berkas pendataan peserta didik yang ingin mendapatkan bantuan.

3. Bagi Peserta Didik Penerima Bantuan PIP

Dalam pemanfaatan dana, diharapkan peserta

didik lebih bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan atau terus meningkat, serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari permasalahan yang terjadi, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai pengolahan atau manajemen mengenai program bantuan dana PIP di dinas pendidikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Ahmad. (2018). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 523–542.
- Astuti, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP N 1 Semin. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi* 2, 6, 121–127.
- Badrudin. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung:

- Penerbit Alfabeta.
- Cosentino, C., Fortson, J., Liuzzi, S., Harris, A., & Blair, R. (2019). Can scholarships provide equitable access to high-quality university education? Evidence from the Mastercard Foundation Scholars Program. *International Journal of Educational Development*, 71, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102089>
- Damayanti, D., Suwarni, N., & Nugraheni, I. (2018). Pemanfaatan KIP oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung. *Jurnal FKIP Universitas Lampung*.
- Ellis, J. M. (2015). *College Readiness Beliefs and Behaviors of Adolescents in a Pre-College Access Program: An Extension of the Theory of Planned Behavior*. (Dissertation, University of Michigan).
- Fathurrohman, M., & Sulistyorini. (2012). *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Hayati, N., & Sari, E. Y. (2019). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 468–480.
- Karmila, Zulfan, & Nusuary, F. M. (2019). Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(4), 1–12.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Ngiode, S., & Erwinsyah, A. (2020). Keefektifan Program Indonesia Pintar di Madrasah Kabupaten Gorontalo. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 48–58.
- Pulungan, I. A. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat*. (Tesis, Universitas Medan Area).
- Riddell, A., & Nino-Zarazua, M. (2016). The effectiveness of foreign aid to education: What can be learned? *International Journal of Educational Development*, 48, 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.013>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and*

Administration Review,
2(1), 1–12.

2019.v6.i1.p44-53

Rozikin. (2020). Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Di MI Darussa'adah Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Taujih : Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 84–111.

Saini, M., Singh, M., Kaur, M., & Kaur, M. (2021). Analysing the tweets to examine the behavioural response of Indian citizens over the approval of national education policy 2020. *International Journal of Educational Development*, 82, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102356>

Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 270–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872>

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk>